



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH  
KOMISI VI DPR RI  
RAPAT KERJA DENGAN MENTERI BUMN RI**

- Tahun Sidang : 2023-2024  
Masa Persidangan : V  
Rapat Ke- : 33 (Tiga puluh tiga)  
Jenis Rapat : Raker  
Sifat Rapat : Terbuka  
Hari, Tanggal : Rabu, 10 Juli 2024  
Waktu : Pukul 20.26 s.d. 21.36 WIB  
Tempat : Ruang Rapat Komisi VI DPR RI,  
Gedung Nusantara I Lt. 1  
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta 10270
- Ketua Rapat : M. Sarmuji, S.E., M.Si.  
(Wakil Ketua Komisi VI DPR RI/F-PG)
- Acara : Pembahasan mengenai Pengambilan Keputusan  
terkait dengan Penyertaan Modal Negara (PMN)  
Tahun 2025
- Sekretaris Rapat : Dewi Resmini, S.E., M.Si.  
(Kabag Sekretariat Komisi VI DPR RI)
- Hadir : **A. ANGGOTA DPR RI:**  
29 dari 55 orang Anggota dengan rincian:

**1. FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA  
PERJUANGAN (F-PDIP)**

12 dari 12 orang Anggota

1. Aria Bima
2. Adisatrya Suryo Sulisto
3. Prof. Assc. Dr. Darmadi Duriyanto, S.E.,  
M.B.A.
4. Rieke Diah Pitaloka
5. ST. Ananta Wahana, S.H., M.H.
6. Sonny T. Danaparamita
7. Ir. Deddy Yevry Hanteru Sitorus, M.A.
8. Dr. Evita Nursanty, M.Sc.
9. Sondang Tiar Debora Tampubolon
10. H. Mufti A.N. Anam
11. Ir. Harris Turino, M.Si., M.M.
12. I Nyoman Parta, S.H.

**2. FRAKSI PARTAI GOLKAR (F-PG)**

5 dari 8 orang Anggota

1. M. Sarmuji, S.E., M.Si.
2. Gde Sumarjaya Linggih, S.E., M.A.P.
3. Doni Akbar, S.E., M.M.
4. Trifena M. Tinal, B. SC.
5. Drs. H. Dadang S. Muchtar

**3. FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (F-P. GERINDRA)**

1 dari 8 orang Anggota

1. Mohamad Hekal, M.B.A.

**4. FRAKSI PARTAI NASIONAL DEMOKRAT (F-P. NASDEM)**

3 dari 6 orang Anggota

1. Martin Manurung, S.E., M.A.
2. H. Rudi Hartono Bangun, S.E., M.A.P.
3. H. Subardi, S.H., M.H.

**5. FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (F-PKB)**

3 dari 6 orang Anggota

1. Ir. H. M. Nasim Khan
2. Siti Mukaromah, S. Ag. M.A.P.
3. Luluk Nurhamidah, M.Si., M.P.A.

**6. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT (F-PD)**

3 dari 5 orang Anggota

1. Dr. Ir. Herman Khaeron, M.Si.
2. Muslim SHI., M.M.
3. Hj. Melani Leimena Suharli

**7. FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (F-PKS)**

1 dari 4 orang Anggota

1. Amin AK, M.M.

**8. FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL (F-PAN)**

1 dari 4 orang Anggota

1. Hj. Intan Fauzi, S.H., LLM.

**9. FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (F-PPP)**

0 dari 2 orang Anggota

-

**B. UNDANGAN/PEMERINTAH:**

Menteri BUMN RI (Dr. H. Erick Thohir, B.A., M.B.A.) beserta jajaran

**JALANNYA RAPAT:**

**KETUA RAPAT (M. SARMUJI, S.E., M.Si./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):**

Bisa kita mulai, Pak Menteri? Pak Menteri, bisa kita mulai?

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,*  
Salam sejahtera untuk kita semua,  
Om swastiastu,  
*Namo Buddhaya,*

**Yang terhormat Pimpinan, dan  
Anggota Komisi VI DPR RI,  
Yang terhormat dan kami ucapkan selamat datang kepada Menteri  
BUMN RI, Bapak Erick Thohir, beserta seluruh jajaran,**

Puji syukur marilah kita *haturkan kehadiran* Allah *Subhanahu wa taala*, Tuhan Yang Maha Kuasa, atas limpahan rahmat pada hari ini, kita bisa melaksanakan Rapat Kerja dengan Menteri BUMN RI dalam keadaan sehat *walafiat*.

Sebelum kita mulai, Sekretariat melaporkan berdasarkan absensi yang ada, anggota yang menandatangani daftar hadir 27 orang, izin 14 orang, jumlah fraksi 9 orang. Dengan demikian, rapat ini memenuhi kourum sebagaimana diatur dalam Tata Tertib Pasal 276 ayat (1), maka perkenankan kami membuka rapat kerja pada hari ini, dan saya nyatakan rapat terbuka untuk umum.

Setuju ya?

**(RAPAT: SETUJU)  
(RAPAT DIBUKA PUKUL 20.26 WIB)**

Terima kasih kami sampaikan kepada Menteri BUMN RI beserta seluruh jajaran yang hadir, atas kesediaan waktunya menghadiri Rapat Kerja Komisi VI DPR RI pada hari ini.

Sesuai dengan undangan yang telah kami sampaikan, agenda Rapat Kerja Komisi VI DPR RI pada hari ini adalah pembahasan mengenai:

1. Pengambilan keputusan terkait Penyertaan Modal Negara Tahun 2025;
2. *Progress* Pembentukan.



Baik, satu agenda saja.

Saya juga minta persetujuan, rapat kita bisa kita akhiri pukul 21.30 ya? Sementara ya? Oke.

**(RAPAT: SETUJU)**

Kita fokus persetujuan *aja*.

**Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang saya hormati,**

Dalam beberapa hari ini kita telah membahas dengan intens, baik di forum pendalaman, maupun di forum Rapat Dengar Pendapat dengan BUMN-BUMN pengaju PMN. Kita sudah berdebat cukup panjang, mendalami setiap masalah yang ada di BUMN-BUMN. Untuk itu, tiba saatnya kita akan mengambil keputusan pada malam hari ini.

Sebelum kita mengambil keputusan, dalam penyampaian, pendalaman, perdebatan, ada satu hal yang menggembirakan sebenarnya, yang bisa kita petik dalam pengajuan PMN, terutama dalam 5 tahun terakhir. Di masa yang dulu, PMN itu uangnya kebanyakan atau mungkin sebagian besarnya bahkan semuanya, dibiayai oleh utang luar negeri. Pada saat ini, PMN diajukan dengan mengambil dividen dari BUMN, yang sebenarnya kalau dikalkulasikan itu memang masih surplus antara dividen yang dimasukkan ke dalam keuangan negara dengan PMN yang dialokasikan untuk BUMN-BUMN.

Sebaran dividen mulai tahun 2020 sampai 2024 sebanyak 279,8 triliun, sedangkan sebaran PMN tunai 2020 sampai 2024 sebesar 217,9 triliun.

Sekali lagi, kita sudah mendalami cukup panjang dengan perdebatan yang panjang juga, maka kami, kami persilakan, Pak Menteri dulu untuk menyampaikan pengantarnya, nanti kita akan mengambil keputusan melalui pendapat masing-masing fraksi.

Kami persilakan, Pak Menteri.

**MENTERI BUMN RI (Dr. H. ERICK THOHIR, B.A., M.B.A):**

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,*  
Salam sejahtera untuk kita semua,  
*Shalom,*  
Om swastiastu,  
*Nama Buddhaya,*  
Salam kebajikan,

Tentu,

**Pimpinan yang terhormat, dan**



**Para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Komisi VI yang hadir pada hari ini,**

Terima kasih.

Tentu saya sudah mendapat laporan, bagaimana Komisi VI terus mendampingi, mengawasi, dan yang terpenting memberikan solusi. Tiga hari terakhir saya dengar ada yang rapatnya sampai setengah 1, ada yang lebih awal, tetapi inilah bagaimana yang kita yakini, Komisi VI memang benar-benar punya niat, bersama-sama, memastikan seluruh daripada kegiatan yang ada di BUMN ini berjalan dengan baik.

Apakah yang dinamakan memastikan fiskal atau pendapatan negara, baik dari pajak, PNBPN ataupun *deviden* yang tadi disampaikan, atau juga pelaksanaan tugas yang selalu kita bilang *Agent of Change*, mana yang tentu menjadi bagian penugasan negara dan mana juga beberapa penugasan yang perlu dikoreksi dan diperbaiki untuk ke depannya.

Dan tentu yang terakhir, bagaimana juga Komisi VI memastikan adanya keberpihakan negara melalui BUMN yang namanya menjaga *people's economy* atau ekonomi kerakyatan yang terdiri dari kebijakan-kebijakan seperti yang selalu ditekankan, bagaimana apakah ini memastikan pinjaman kepada perusahaan-perusahaan menengah kecil, apakah tentu *issue*, masalah vendor, dan lain-lain yang terus diawasi dan ditekankan.

Jadi, tentu kami mengucapkan, dari Kementerian BUMN dan seluruh direksi yang hadir, terima kasih yang sebesar-besarnya.

Tadi disampaikan oleh Pimpinan, bahwa kami, terus-terang senang mendengar tadi, bahwa ini salah satu perbaikan yang luar biasa di bawah pengawasan Komisi VI, yang di mana selama ini, yang tadinya PNM itu sangat bergantung dari utang negara kepada luar negeri, tetapi hari ini kita bisa yakinkan bersama-sama, ini menjadi sebuah *sustainability* atau keberlanjutan ketika *deviden* bisa membiayai daripada tentu PMN itu sendiri.

Tadi disampaikan, nilainya kurang lebih 280 miliar selama 5 tahun untuk *deviden*, 280 triliun selama 5 tahun, dan tentu suntikannya kurang lebih sebesar 212.

Dan seperti kita bisa lihat di *slide* ini, memang mayoritas kurang lebih 90% daripada PMN ini, seperti yang selalu disampaikan, ditekankan, memang merupakan penugasan. Yang tidak lain ada sebagian 7% seperti restrukturisasi, 4% pengembangan usaha, dan ini yang tentu bagaimana dipantau terus-menerus.

Dan tentu kalau kita lihat dari *slide*, terus *slide*-nya, terus, terus.

**Nah, ini, izin Pimpinan dan Anggota Dewan terhormat,**



Ini yang tentu kita bisa paparkan, angka detail keseluruhan, yaitu PMN yang dibutuhkan untuk tahun 2025 sebesar 44 triliun, di mana di situ ada jabaran untuk HK, baik kelanjutan untuk fase 2 dan 3. Lalu ada Asabri, ada PLN, ada IFG, ada Pelni, ada Biofarma, Adi, Wika dan tentu lain-lainnya yang saya rasa tidak perlu kami sebut satu-satu. Dan ini tentu, kita berharap ini bisa didukung, karena tadi yang kita sudah garis bawahi, bahwa PMN ini merupakan, tadi, daripada *cash flow* yang sudah kita berikan selama ini.

Dan tentu, besar harapan kami, kami terus mendapat dukungan dari Komisi VI dan tentu pengawasan dan juga solusi-solusi yang bisa diberikan, agar kita bisa bekerja lebih baik lagi dan kita harapkan juga bagaimana hal-hal yang bisa tadi disampaikan, PMN ini bisa tepat sasaran dan bisa memberikan manfaat lebih banyak lagi untuk pertumbuhan ekonomi ataupun dengan hal-hal yang namanya kebijakan yang menjaga daripada pertumbuhan yang bisa terjadi pada saat ini secara menyeluruh.

Itu dari saya, mungkin dari Pak Tiko ingin tambahkan. Silakan, Pak Tiko.

**WAKIL MENTERI BUMN RI (KARTIKA WIRJOATMODJO, S.E., M.B.A.):**

Terima kasih, Pak Menteri.

**Yang saya hormati Pimpinan Komisi VI, dan  
Seluruh Anggota Komisi VI yang kami hormati,**

Tentunya kami, sama dengan Pak Menteri, sangat berterima kasih selama 5 tahun ini, kerja sama kita sangat baik, mulai dari berbagai isu restrukturisasi yang kita selesaikan di awal periode sampai dengan Covid dan sampai dengan hari ini, kita ajukan PMN untuk 2025.

Tadi seperti disampaikan Pak Menteri, kita ingin bahwa dividen kita ke depan terus jauh melebihi PMN dan tentunya nanti secara detail kita bisa membahas satu persatu dan kami yakin teman-teman Dirut sudah menjelaskan.

Memang, cukup banyak penugasan yang masih akan berlanjut di periode berikutnya, terutama di Karya-Karya dan tentunya ini butuh dukungan yang berkelanjutan, termasuk juga penugasan-penugasan baru seperti di kereta api dan di Perumnas, yang memang mendapatkan penugasan baru untuk penggantian kereta *rail commuter*, maupun juga di Perumnas untuk pengembangan perumahan 3 juta rakyat.

Jadi, ini memang nanti kita harapkan pendalaman dari sisi penugasan, maupun restrukturisasi seperti di Wika dan Waskita bisa dilakukan dengan lebih baik. Dan tentunya kami mohon dukungan, supaya kita bisa menuntaskan beberapa tugas ini sebelum periode ini berakhir.

Terima kasih.



**MENTERI BUMN RI (Dr. H. ERICK THOHIR, B.A., M.B.A):**

Terima kasih, Pak Wamen.

Mungkin dari kami, cukup. Mungkin, nanti mungkin ada pendalaman atau diskusi yang lebih, kami persilakan kepada Pimpinan.

Terima kasih.

*Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

**KETUA RAPAT (M. SARMUJI, S.E., M.Si./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):**

*Walaikumsalam,*

Baik, terima kasih, Pak Menteri. Untuk pendalaman, masukan, dan sebagainya, sudah kita lakukan dalam beberapa hari ini. Dan saya berharap catatan kritis, ungkapan, dan masukan yang berlangsung dalam pendalaman-pendalaman, itu merupakan bagian tak terpisahkan dari pembahasan dan kalau nanti kita mengambil persetujuan PMN ini, itu juga bagian tak terpisahkan dari persetujuan kita terhadap PMN.

Jadi, banyak sekali, Pak Menteri, masukan-masukan yang sudah disampaikan oleh anggota, baik menyangkut kinerja BUMN, maupun dari sisi pelayanan-pelayanan yang sudah diberikan oleh BUMN-BUMN.

Saya tidak perlu mengulas satu persatu, saya akan membacakan totalnya saja, total pengajuan PMN kita yang diajukan oleh Kementerian BUMN sebesar 44 triliun 249 miliar. Saya tidak perlu mengulangi ya, Pak Anggota, ya, nanti sudah hafal satu per satu.

Baik, dengan demikian kita akan memasuki rapat persetujuan, kita mintakan persetujuan anggota melalui fraksi masing-masing. Catatan kritisnya sudah didokumentasikan dengan baik, saya yakin juga sudah dituliskan melalui pandangan fraksi masing-masing.

Kami persilakan dari fraksi yang paling besar terlebih dahulu, Fraksi PDI Perjuangan, untuk menyampaikan pendapatnya.

**F-PDIP (Dr. Ir. HARRIS TURINO, S.H., M.Si., M.M.):**

Baik, terima kasih, Pimpinan.

**Yang terhormat Pimpinan, dan  
Rekan-rekan Anggota Komisi VI,  
Yang terhormat Pak Menteri, beserta seluruh jajarannya, dan  
Para Direksi dari BUMN yang mengajukan Penyertaan Modal Negara,**



Izin saya membacakan pandangan akhir dari Fraksi PDI Perjuangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terhadap usulan Penerimaan Penyertaan Modal Negara Tahun Anggaran 2025.

Jadi, puji syukur kita selalu panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan berkat, rahmat, taufik dan hidayah-Nya, hari ini kita bisa menghadiri Rapat Kerja Komisi VI dengan Menteri BUMN dalam rangka Pengambilan Keputusan mengenai usulan BUMN Penerima PMN Tahun 2025.

Setelah menerima penjelasan dari Saudara Menteri dalam Rapat Kerja tanggal 7 Juni 2024 dan melakukan serangkaian pendalaman dengan BUMN Calon Penerima PMN 2025, dalam rapat dengar pendapat dan *focus group discussion* tanggal 7-10 Juli 2024, maka dalam Rapat Kerja ini, izinkan kami dari Fraksi PDI Perjuangan memberikan Pandangan dan Pendapat Akhir terhadap Usulan BUMN Penerima PMN Tahun 2025.

Saya rasa enggak perlu saya bacakan semua, tetapi inti-intinya adalah bahwa, kami menyadari, bahwa *deviden* yang diberikan oleh BUMN kepada negara ini besarnya 279,7 triliun dalam kurun waktu tahun 2000 sampai 2024. Ini lebih besar dibandingkan dengan realisasi PMN yang hanya sebesar 226,1 triliun.

Selain menyumbangkan *deviden* kepada negara, kami juga mengapresiasi bahwa BUMN turut berkontribusi dalam penerimaan negara melalui pendapatan negara bukan pajak.

Namun, menjadi catatan, bahwa capaian *deviden* pada periode tersebut belum merefleksikan kinerja seluruh BUMN, karena *deviden* dikontribusikan, didominasi oleh beberapa BUMN saja. Di antaranya BUMN perbankan, BUMN energi, dan BUMN telekomunikasi.

Dengan demikian, dalam rangka untuk mendukung kinerja BUMN lebih baik ke depannya, maka kami mendukung pemberian PMN kepada BUMN yaitu, sebagai berikut:

Kami menyetujui usulan PMN Tahun Anggaran 2025 untuk 14 BUMN, yaitu:

1. Hutama Karya sebesar 13,868 triliun,
2. PT Adi Karya sebesar 2,096 triliun,
3. PT Wijaya Karya sebesar 2 triliun,
4. PT Pembangunan Perumahan sebesar 1,563 triliun.

Ini semuanya adalah penugasan untuk BUMN-BUMN Karya.

5. PT PLN sebesar 3 triliun, ini untuk listrik desa,





6. BPUI atau IFG sebesar 3 triliun, untuk perkuatan permodalan pada Askrindo dan Jamkrindo,
7. PT Pelni sebesar 2,5 triliun, untuk pergantian armada kapal yang memang sudah tua dengan tambahan dana dari ekuitas Pelni sebesar 500 miliar,
8. PT KAI sebesar 1,8 triliun, yang akan digunakan untuk *train set*, pengadaan *train set* kereta komuter Indonesia,
9. PT INKA sebesar 976 miliar, ini untuk pengadaan sarana dan prasarana produksi,
10. Untuk Perum Damri, kami hanya memberikan persetujuan sebesar 500 miliar yang digunakan untuk peremajaan 384 *bis* diesel angkutan perintis, sedangkan yang untuk *bis* listrik, menurut hemat kami bisa diperoleh dari sumber yang lain,
11. PT Asabri sebesar 3,61 triliun, dengan catatan yang sangat kritis bahwa Penyertaan Modal Negara ini hanya digunakan untuk pembayaran kewajiban manfaat bagi peserta, dan, dan yang paling penting adalah PT Asabri wajib, wajib menyampaikan laporan investasi, berikut hasilnya, terhadap penggunaan dana PMN ini secara berkala kepada Komisi VI, untuk mendapatkan jaminan bahwa Penyertaan Modal Negara ini digunakan sebaik-baiknya dan tidak untuk di korupsi,
12. PT Biofarma sebesar 2,212 triliun, dengan catatan Biofarma harus memastikan bahwa peruntukan dana PMN ini hanya digunakan untuk pembangunan sarana produksi vaksin. Biofarma juga wajib untuk menyampaikan laporan penggunaan dana PMN secara berkala kepada Komisi VI,
13. PT LEN sebesar 2 triliun,
14. PT Rajawali Nusantara Indonesia atau ID Food sebesar 1,624 triliun.

Yang kedua, kami menolak usulan PMN untuk tahun 2025 untuk dua BUMN. Yang pertama, PT Danareksa. Kami beranggapan bahwa PT Danareksa bisa mendapatkan pendanaan dalam bentuk lain di luar Penyertaan Modal Negara dan yang kedua adalah PT Perumnas, karena di PT Perumnas, bisnis model dan konsep perencanaannya tidak jelas.

Yang ketiga, kami meminta Kementerian BUMN dan seluruh BUMN penerima PMN untuk melaporkan realisasi penggunaan dana PMN secara berkala kepada Komisi VI DPR RI.

Yang keempat, kami mengusulkan pembentukan Panitia Kerja Pengawas Penggunaan PMN Komisi VI DPR RI.

Demikian, pendapat akhir Fraksi PDI Perjuangan.

Terima kasih.

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,*



Jakarta, 10 Mei.  
Pimpinan Kelompok Komisi VI  
Fraksi PDI Perjuangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,  
Adi Satria Suryo Sulisty A196, ditandatangani.

**KETUA RAPAT (M. SARMUJI, S.E., M.Si./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):**

Sudah, Pak Harris?

Terima kasih, Pak Harris Turino mewakili PDI Perjuangan, sudah menyampaikan pendapat fraksi.

Selanjutnya, *cross* ke Fraksi Partai Persatuan Pembangunan.

**F-PPP (Dr. H. ACH BAIDOWI, S.Sos., M.Si):**

Terima kasih, Ketua.

Rupanya masih ingat kalau PDI bersama PPP, Ketua ini. *Kan* dari PDI ke PPP.

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

**Pimpinan, dan  
Anggota Komisi VI yang kami hormati,  
Menteri BUMN dan jajaran yang kami hormati,**

Terkait dengan pengajuan PMN tahun 2025, kita dalam beberapa hari terakhir ini sudah banyak mendiskusikan dan membedah terkait dengan pengajuan dari Kementerian BUMN. Tentunya semua menjadi catatan, termasuk kalau mau, sebenarnya kita enggak tega *gitu*, sebenarnya menurut penilaian kami, BUMN-BUMN yang bermasalah itu selayaknya tidak mendapatkan PMN. Namun, demi keberlangsungan BUMN itu sendiri dan kestabilan ekonomi, maka fraksi PPP dapat menerima, apalagi kalau kita lihat dari struktur penggunaan BUMN, PMN di tahun 2025 ini, kalau lihat dari strukturnya, kalau yang sebelumnya 89% itu banyak digunakan untuk penugasan, tetapi besok itu sudah ada perubahan, hanya sekitar 69% ya penugasan dan pengembangan usaha 27% dan restrukturisasi 4%. Jadi, layak diberikan kesempatan untuk memperbaiki kinerja perusahaan.

Maka dari itu, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan setuju terhadap pengajuan PMN yang dilakuk, yang diajukan oleh Kementerian BUMN, untuk diproses sesuai ketentuan perundang-undangan.

Adapun catatan-catatan lainnya, nanti kami sampaikan secara tertulis sebagai bagian tidak terpisahkan dari pandangan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan.



Terima kasih. Kurang lebihnya, mohon maaf.

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

**KETUA RAPAT (M. SARMUJI, S.E., M.Si./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):**

Baik, terima kasih, Pak Baidowi.

Selanjutnya dari Fraksi Partai Golkar.

**F-PG (Drs. H. DADANG S. MUCHTAR):**

*Bismillahirrahmanirrahim,  
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

**Bapak Menteri bersama jajarannya,  
Pimpinan, dan  
Anggota Komisi VI yang saya banggakan, saya hormati,**

Fraksi Partai Golkar DPR RI menyepakati rencana alokasi anggaran PMN tahun 2020, 25 dengan catatan, sesuai dengan yang tertulis di sini, tidak saya bacakan, mempersingkat waktu.

Demikian, sikap Fraksi Partai Golkar. Semoga Allah *Subhanahu wa taala* melimpahkan rahmat dan rida-Nya kepada kita semuanya, menunaikan tugas dan amanah bagi terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur.

*Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

Jakarta, 10 Juli 2024.  
Ditandatangani,  
Kapoksi Fraksi Golkar,  
Sarmuji, S.E.,M.Sc..

Secara singkat, saya serahkan. Entar *dulu*, Pak. Saya serahkan *dulu*, supaya jelas.

**(PENYERAHAN PANDANGAN FRAKSI PARTAI GOLKAR)**

**KETUA RAPAT (M. SARMUJI, S.E., M.Si./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):**

Sebenarnya panjang itu, ininya, narasinya panjang sebenarnya.

**WAKIL KETUA (MOHAMAD HEKAL, M.B.A./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):**

Tiga malam berturut-turut, berdebat terus.



**KETUA RAPAT (M. SARMUJI, S.E., M.Si./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):**

Foto dulu katanya, Pak.

**WAKIL KETUA (MOHAMAD HEKAL, M.B.A./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):**

Di belakangnya ada tulisan bosnya gede itu.

**KETUA RAPAT (M. SARMUJI, S.E., M.Si./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):**

Oh, ya, ya, ya. *Oke, oke.*

**WAKIL KETUA (FAISOL RIZA, S.S./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):**

Salaman juga.

**F-PDIP (Dr. Ir. HARRIS TURINO, S.H., M.Si., M.M.):**

Salaman juga.

**KETUA RAPAT (M. SARMUJI, S.E., M.Si./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):**

Baik, terima kasih Pak Harris dan Pak Dadang, mapnya.

Selanjutnya, kami persilakan dari Fraksi PAN.

**F-PAN (ABDUL HAKIM BAFAGIH):**

Kita terinspirasi dari Pak Dadang ini, cuman mapnya belum ada, Pak Dadang, kita. Singkat, jelas, padat.

*Bismillahirrahmanirrahim,  
Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh,*

**Yang saya hormati Pimpinan, dan  
Anggota Komisi VI,  
Yang saya hormati Pak Erick Thohir, Menteri BUMN terbaik sepanjang  
masa, menurut saya, Pak Erick, yes, dan juga  
Seluruh jajaran yang hadir dalam rapat kerja pada malam hari ini,**

Berkaitan dengan pendapat akhir Fraksi Partai Amanat Nasional tentang usulan PMN tahun 2025 dari Kementerian BUMN, kami dari Fraksi PAN menyetujui usulan pagu PMN tahun 2025 sebesar 44 triliun 249 miliar rupiah dengan rincian sebagai berikut.

- Untuk PT KAI, sebesar 1,8 triliun, dengan peruntukan untuk pengadaan *train set* baru penugasan pemerintah,
- Kemudian untuk PT Utama Karya, sebesar Rp13 triliun 868 miliar, untuk melanjutkan pembangunan jalan tol Trans Sumatera Fase 2 dan 3,
- Kemudian untuk PT Adi Karya, untuk pembangunan Tol *Jogja-Bawen* dan *Solo-Jogja* sebesar Rp2 triliun 96 miliar,
- Kemudian untuk PT PLN sebesar Rp3 triliun, untuk program listrik desa,
- Kemudian untuk PT Biofarma sebesar Rp2 triliun 212 miliar untuk fasilitas capex baru, dengan catatan Pak Menteri dan Pak Dirut Biofarma, kami dari Fraksi PAN *nitip*, ini tidak digunakan untuk anak perusahaan Bapak,
- Kemudian untuk PT LEN Industri sebesar Rp2 triliun, untuk modernisasi dan peningkatan kapasitas produksi,
- Kemudian untuk PT Pelni sebesar Rp2,5 triliun, untuk pengadaan kapal baru.
- Kemudian untuk PT IFG atau Bahana PUI sebesar 3 triliun, guna penguatan permodalan KUR.
- Kemudian untuk PT RNI sebesar Rp1 triliun 624 miliar, yang diperuntukkan untuk modal kerja program CPP, dan
- Kemudian untuk PT Damri, Pak Menteri, sebesar Rp490 miliar, yang diperuntukkan untuk peremajaan kendaraan angkutan perintis.
- Kemudian untuk PT PP sebesar Rp563 miliar, yang diperuntukkan untuk penyelesaian proyek Tol *Jogja-Bawen* dan juga sisa alokasi sebesar Rp11 triliun 96, dijadikan sebagai cadangan pembiayaan investasi.

Jadi, secara usulan, secara pagu, kami menyetujui sebesar Rp44 triliun 249 miliar.

Berikut pendapat akhir dari Fraksi Partai Amanat Nasional, untuk secara tertulis akan kami sampaikan menyusul, Pimpinan.

Demikian yang dapat kami sampaikan dari Fraksi Partai Amanat Nasional. Sukses selalu Kementerian BUMN di bawah Bapak Erick Thohir.

*Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

**KETUA RAPAT (M. SARMUJI, S.E., M.Si./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):**

Terima kasih, Pak Hakim.

Yang terakhir kayaknya pesanan Ketua Umum tadi, sukses. Kalimat terakhirnya itu.

Baik, selanjutnya kami persilakan, Fraksi Partai Gerindra.



**WAKIL KETUA (MOHAMAD HEKAL, M.B.A./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):**

Baik, terima kasih, Pak Sarmuji.

**Pimpinan, dan  
Anggota Komisi VI yang saya banggakan, dan  
Pak Menteri, Pak Wakil Menteri BUMN RI, yang beserta seluruh  
jajarannya,**

Memang, tadi yang sudah disampaikan di awal itu sangat benar, bahwa kali ini kita bangga, walaupun banyak kritik terhadap PMN, tapi memang di periode ini kita juga bisa berkontribusi, *deviden* melebihi apa yang kita gunakan kembali dalam bentuk PMN. Dan mudah-mudahan PMN-PMN yang kita tanam sekarang ini, nanti akan membuahakan hasil yang lebih baik lagi di periode-periode yang akan datang.

Dan dari Fraksi Partai Gerindra melihat secara umum, apa yang di usulkan oleh Kementerian BUMN, di sini kira-kira semuanya menyangkut hajat hidup orang banyak. Ada sektor transportasi umum, ada sektor ketahanan pangan, ada sektor ketahanan negaranya, ada sektor industri obat-obatan, dan untuk pengembangan usaha masyarakat kecil, yaitu melalui Jamkrindo dan Askrindo untuk mendukung program KUR dan tentunya infrastruktur yang akan dibangun oleh BUMN Karya kita.

Memang ini belum sempurna, banyak yang harus kita benahi dan ke depan, tentu kita sebagai Partai Gerindra harus mendukung presiden yang akan datang, dengan upaya pembangunan, salah satunya menggunakan tangan-tangan BUMN. Dan ini sudah di arah yang benar, memang perbaikan akan selalu harus kita laksanakan. Jadi secara umum, dan ini masih usaha, karena kita habis ini juga akan menghadapi RUU APBN di Agustus tanggal 16, setelah Nota Keuangan masuk.

Tapi secara umum, apa yang diusulkan oleh Menteri BUMN adalah sudah di jalur yang benar, jadi partai Gerindra bisa menyetujui usulan PMN sebesar 44 triliun 249 miliar. Mudah-mudahan ini bisa kita wujudkan dan nanti kita koreksi apabila nanti pagu indikatifnya agak berubah, tapi secara umum kita menyetujui dan nanti teks resminya akan kita susulkan.

Terima kasih, Pimpinan.

**KETUA RAPAT (M. SARMUJI, S.E., M.Si./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):**

Terima kasih, Pak Hekal.

Karena teksnya menyusul, salamannya menyusul juga ini.



Selanjutnya, kami persilakan dari Fraksi Partai Demokrat.

**F-PD (MUSLIM, S.HI., M.M.):**

Terima kasih, Pimpinan.

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

**Pimpinan, dan  
Rekan-rekan Anggota Komisi VI,  
Pak Menteri, Pak Erick, beserta jajaran Kementerian BUMN,**

Pendapat Fraksi Partai Demokrat DPR RI terhadap usulan Penyertaan Modal Negara tahun 2025.

Pertama, tentu kita bersyukur malam hari ini kita dapat hadir dalam rapat khusus berkaitan dengan PMN. Izinkan, kami Fraksi Partai Demokrat menyampaikan pandangan usulan PMN tahun 2025.

Saya tidak membacakan secara menyeluruh, Pak Menteri. Namun ada beberapa hal yang menjadi masukan, yang menjadi landasan terhadap khususnya pemerintah untuk memberikan suntikan berupa PMN bagi perusahaan-perusahaan BUMN yang dimaksud.

Namun demikian, kebijakan ini tentunya harus tetap memperhatikan kemampuan fiskal negara, prinsip kehati-hatian, *sense of urgency*, aspek keberlanjutan, dan juga *multiplier effect*.

Dalam rapat kerja hari ini, kita akan mengambil keputusan terhadap usulan BUMN penerima PMN tahun 2025. Tentu sebelumnya, Kementerian BUMN telah mengajukan anggaran untuk PMN sebesar 44,24 triliun.

Adapun rincian tersebut, yang sudah diusulkan, saya tidak bacakan lagi, Pak Menteri. Karena sudah disampaikan tadi oleh rekan-rekan. Pada prinsipnya, kami mendukung adanya pemberian PMN yang diberikan untuk perusahaan yang memerlukan.

Namun demikian, kami ingin menyampaikan catatan kritis untuk menjadi perhatian pemerintah, sebagai berikut.

1. Tentu Fraksi Partai Demokrat mengingatkan bahwa pemberian PMN kepada perusahaan-perusahaan BUMN ini harus terukur dan juga tepat sasaran, pemerintah juga harus mempertimbangkan kemampuan fiskal negara agar pemberian PMN terhadap BUMN tidak menjadi beban APBN.

Tentu perhatikan aspek juga penggunaan APBN sebelumnya, apakah memang sudah tepat guna, efektif dan efisien. Perlu juga dikembangkan pula mekanisme pengelolaan PMN yang lebih baik



- dengan meningkatkan sistem pengelolaan kinerja terhadap PMN dan investasi pemerintah kepada BUMN.
2. Tentu kami berharap bahwa pemanfaatan nilai-nilai dari PMN ini juga dapat terasa langsung bagi pertumbuhan ekonomi nasional, maupun pertumbuhan ekonomi daerah, serta juga memiliki dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan rakyat, sektor UMKM, pembukaan lapangan kerja baru bagi tenaga kerja lokal, pemberdayaan petani dan nelayan, serta sektor-sektor lainnya yang dimiliki, yang memiliki pengaruh langsung terhadap kualitas hidup rakyat kecil di Indonesia.
  3. Seluruh BUMN penerima PMN harus mampu memastikan bahwa PMN yang diterima akan memberikan keuntungan bagi korporasi, serta memiliki *value added* dan *multiplier effect* yang konstruktif terhadap sektor lainnya yang menjadi variabel dalam pertumbuhan ekonomi nasional, dari sektor hulu ke hilir, sehingga berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi negara dan kesejahteraan masyarakat.
  4. Tentu PMN harus digunakan secara produktif, efektif dan efisien. PMN juga harus memperhatikan aspek keterpaduan, keberlanjutan dan inklusivitas, serta dapat memberikan keuntungan bagi korporasi, sehingga perusahaan, sehingga perusahaan-perusahaan BUMN penerima PMN dapat menampilkan performa yang baik dengan memberikan kontribusi yang besar dalam membentuk *dividen* yang memadai dan berdampak langsung nantinya terhadap pemasukan dan juga peningkatan pajak untuk negara.
  5. Tentu Fraksi Partai Demokrat juga meminta pemerintah untuk selalu melakukan pengawasan terhadap tata kelola perusahaan secara intensif, untuk menilai apakah BUMN dapat *meleverage* PMN yang telah diterima, untuk kemudian dapat mengkaji apabila di kemudian hari BUMN yang dimaksud layak mendapatkan PMN sebesar yang diusulkan. Setelah besaran yang diusulkan atau bahkan tidak sama sekali, Pak Menteri.

Tentu pada akhirnya, Fraksi Partai Demokrat setuju dengan catatan di atas, terkait pemberian PMN tahun 2025 bagi perusahaan-perusahaan BUMN yang dimaksud.

Namun demikian, upaya efisiensi dan restrukturisasi BUMN yang meliputi aspek manajemen, serta *cost of operation* agar pengembangan serta investasi korporasi dan prinsip *good corporate government* bisa tercapai.

Demikian, pendapat Fraksi Partai Demokrat. Semoga BUMN dapat terus melakukan inovasi dan juga memberikan kontribusi yang lebih maksimal untuk kemakmuran bangsa dan seluruh rakyat Indonesia, karena harapan rakyat adalah perjuangan Demokrat.

Terima kasih, Pak Menteri.





Jakarta, 10 Juli 2024,  
Sekretaris Poksi VI Fraksi Partai Demokrat  
Dewan Perwakilan Republik Indonesia,  
Muslim, S.HI., M.M.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT (M. SARMUJI, S.E., M.Si./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):**

Terima kasih, Pak Muslim.

**F-PD (MUSLIM, S.HI., M.M.):**

Kita serahkan dulu, Ketua.

**KETUA RAPAT (M. SARMUJI, S.E., M.Si./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):**

Mewakili Fraksi Partai Demokrat.

**WAKIL KETUA (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):**

Foto, foto.

**KETUA RAPAT (M. SARMUJI, S.E., M.Si./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):**

Foto, Foto.

**F-PD (MUSLIM, S.HI., M.M.):**

Iya, dong. Foto, foto, foto, foto.

**(PENYERAHAN PANDANGAN FRAKSI PARTAI DEMOKRAT)**

**WAKIL KETUA (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):**

*Cekrek.*

**F-PD (MUSLIM, S.HI., M.M.):**

*Udah?*

**WAKIL KETUA (MOHAMAD HEKAL, M.B.A./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):**

Salam, salam, dong.



Salam.

**KETUA RAPAT (M. SARMUJI, S.E., M.Si./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):**

Baik.

Selanjutnya, kami persilakan dari Fraksi Partai Nasdem.

**WAKIL KETUA (MARTIN MANURUNG, S.E., M.A./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):**

*Makasih*, Pak Sarmuji. Saya mewakili dari Fraksi Partai Nasdem.

1. Kami dari Fraksi Partai Nasdem mengapresiasi kinerja Kementerian BUMN yang telah menghasilkan *dividen* kepada negara sebesar Rp279,8 triliun sejak tahun 2020 sampai tahun 2024. Jumlah ini lebih besar Rp 61,9 triliun dari total PMN yang diberikan pada periode yang sama.
2. Fraksi Partai Nasdem menyetujui pagu usulan PMN sebesar Rp44,249 triliun, dengan catatan untuk PT PLN, agar dipastikan pencairannya, sehingga apabila dipandang perlu, bisa dimasukkan dalam cadangan pembiayaan investasi dan terkait dengan Perum Perumnas, agar ada kejelasan masalah rumah-rumah yang sudah dibangun selama ini.
3. Fraksi Partai Nasdem juga mendorong Kementerian BUMN bersama dengan kementerian terkait untuk melakukan reorganisasi dan restrukturisasi BUMN Karya.

Demikian pendapat dari Fraksi Partai Nasdem, secara tertulis menyusul.

Salam restorasi,

**KETUA RAPAT (M. SARMUJI, S.E., M.Si./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):**

*Makasih*, Pak Martin mewakili Fraksi Partai Nasdem.

Selanjutnya, kami persilakan PKB.

Penutup.

**F-PKB (TOMMY KURNIAWAN):**

Penutup, tumben PKB penutup ini, Pimpinan.

Terima kasih.



**KETUA RAPAT (M. SARMUJI, S.E., M.Si./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):**

PKS. Nanti penutupnya, PKS.

**F-PKB (TOMMY KURNIAWAN):**

Oh iya, PKS belum, ya.

Terima kasih, Pimpinan.

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

**Yang terhormat Pimpinan Komisi VI,  
Yang kami hormati Menteri BUMN Republik Indonesia,  
Yang saya hormati Bapak-Ibu Anggota Komisi VI DPR RI, serta  
Hadirin yang berbahagia,**

*Alhamdulillah*, di kesempatan berbahagia ini, mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah *Subhanahu wa taala* atas nikmat dan karunia-Nya, sehingga kita dapat hadir melaksanakan Rapat Kerja Komisi VI DPR RI bersama Menteri BUMN dalam rangka mendengarkan penyampaian pandangan fraksi terhadap PMN tahun 2025.

Selawat serta salam tidak lupa kita *haturkan* kepada Rasulullah *Wallallahu alaihi wasallam* yang telah memberikan ilmu dan contoh dalam mengelola dan mengatur masyarakat, bangsa, dan negara, sehingga kita menjadikannya teladan dan bekerja demi terwujudnya peradaban Indonesia yang *baldatun, toyyibatun, warobbun ghofur*.

Selanjutnya, kami mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, untuk menyampaikan pandangan fraksi terhadap PMN tahun 2025.

Mengawali penyampaian ini, izinkan kami, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh Anggota Komisi VI DPR RI yang melakukan pembahasan tentang Penyertaan Modal Negara atau PMN tahun 2025.

**Pimpinan Sidang,  
Menteri BUMN,  
Para Anggota Dewan, serta  
Hadirin yang saya hormati,**

Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa menghendaki agar Penyertaan Modal Negara (PMN) tahun 2025 dapat semakin mempercepat peningkatan kinerja perusahaan-perusahaan BUMN. Oleh karena itu, PMN sama sekali bukan ditujukan untuk pembayaran utang, bunga, atau beban keuangan lainnya.



Kami dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa mendukung berbagai langkah yang dilakukan pemerintah dalam membesarkan perusahaan-perusahaan BUMN, termasuk dalam hal ini adalah pemberian PMN. Tetapi, kami memberikan beberapa catatan sebagai berikut.

Mengingat bahwa pemberian PMN ditujukan untuk pengembangan dan peningkatan usaha, maka perusahaan-perusahaan yang menerima PMN harus bisa menunjukkan adanya perubahan kinerja setelah menerima PMN, sehingga pemberian modal berdampak *real* terhadap peningkatan laba perusahaan dan mampu mandiri untuk bersaing di tingkat nasional dan internasional.

B. Mengingat pemberian PMN hanya diberikan untuk beberapa perusahaan BUMN, maka penggunaan dana PMN harus benar-benar selektif, terkait prioritas dan manfaat yang berdampak banyak bagi peningkatan kesejahteraan rakyat, peningkatan daya beli masyarakat, peningkatan kesempatan kerja, dan daya dorong ekonomi dan pemberdayaan masyarakat sesuai peran BUMN sebagai agen pembangunan dan sumber pendapatan negara.

Kemudian, kami juga memberikan catatan-catatan secara spesifik kepada BUMN yang akan menerima PMN tahun 2025. Catatan untuk BUMN Karya, selain PMN, kami memberikan catatan agar reorganisasi BUMN Karya yang bermasalah agar segera dilanjutkan dan diselesaikan, agar BUMN Karya bisa bekerja lebih baik dalam membangun bangsa dan negara ini di masa yang akan datang.

Kemudian, catatan berikutnya untuk BUMN Asabri, harus segera menyelesaikan persoalan hukum dan segera mengevaluasi berbagai skema bisnis asuransi yang selama ini berjalan agar disesuaikan dengan kondisi saat ini.

Kemudian, catatan berikutnya kepada BUMN Bahana PUI, agar benar-benar mengawasi penjaminan KUR untuk UMKM yang tanpa angunan agar tidak berupa penjaminan seolah-olah kosong.

Kemudian untuk PLN, catatannya adalah lisdas atau listrik desa harus kita dukung dan selama ini tahun 2002, 2003, 2004 PLN tidak mendapatkan PMN dari negara.

Kemudian catatan berikutnya untuk Damri, setelah bergabungnya PPD, memiliki sekian banyak persoalan, PMN ini tentunya bisa membantu menyelesaikan persoalan tersebut.

Catatan untuk BUMN LEN, kebutuhan yang besar karena kita membutuhkan pertahanan yang kuat. Kami dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa justru meminta kepada Kementerian BUMN untuk menambah pengajuan PMN untuk LEN Industri ini, agar pertahanan Indonesia semakin



kuat dan memiliki industri pertahanan yang mandiri di masa yang akan datang.

Kemudian terakhir catatan untuk Perumnas, kebutuhan perumahan untuk rakyat sangat besar. *Backlog* sekitar 9 juta rumah lebih dan Tapera sudah ditunda, maka dari itu PMN untuk Perumnas ini akan membantu penyediaan rumah untuk rakyat yang terjangkau harganya.

**Pimpinan Sidang,  
Menteri BUMN,  
Para Anggota Dewan, serta  
Hadirin yang terhormat,**

Demikianlah pandangan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa terhadap PMN tahun 2025. Selanjutnya, setelah mengikuti dan mempertimbangkan seluruh proses yang berlangsung, maka Fraksi PKB mengucapkan, *Bismillahirrahmanirrahim* menyatakan persetujuannya agar Penyertaan Modal Negara tahun 2025 dapat diambil keputusan pada tahap selanjutnya, sesuai dengan prosedur, mekanisme, dan ketentuan yang berlaku.

Atas perhatian semuanya, terima kasih. Mohon maaf atas segala khilafan dan kesalahan.

*Wallahul muwaffieq ila aqwamit thoriq,  
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

**KETUA RAPAT (M. SARMUJI, S.E., M.Si./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):**

*Waalaikumsalam,*

Terima kasih, Pak Tommy mewakili Fraksi PKB.

Kalau lihat narasinya, tanda-tanda bergabung koalisi sangat jelas soalnya. Bisa-bisa nambah menterinya ini.

**(PENYERAHAN PANDANGAN FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA)**

Baik, terakhir, kami persilakan dari Fraksi PKS, Pak Amin.

**F-PKS (AMIN AK, M.M.):**

Terima kasih.

**Pimpinan, dan  
Anggota,  
Pak Menteri, Pak Wamen,  
Pak Sekmen, dan semua jajaran,**



**Hadirin sekalian yang dirahmati Allah,**

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,*  
Salam sejahtera untuk kita semua,

Pertama, sebagaimana tadi teman-teman, sebagian fraksi mengapresiasi, kami juga mengapresiasi, Pak, kinerja Kementerian BUMN yang selama masa 2020-2024 ini, dividennya lebih besar ya, di 61 triliun, dibanding dengan PMN yang dialokasikan. Walaupun sebetulnya itu juga tidak bisa dibanding-bandingkan secara langsung, karena dividen itu adalah hasil kesepakatan yang diambil, berapa persen yang diambil dari laba, sementara keputusan untuk alokasi PMN itu kan keputusan pemerintah. Mau berapa besarnya penugasannya, di mana, di mana, itu *kan* memang tidak bisa langsung dibanding-bandingkan, tapi kita apresiasi itu.

Yang kedua, sebetulnya ini kita juga apresiasi, tapi ini menjadi keprihatinan kita bersama bahwa selama masa 2020 sampai 2024 ini ya, itu terungkap kasus-kasus korupsi, *moral hazard fraud*, yang merugikan BUMN dan tentu menjadi beban negara pada akhirnya, yang itu terjadi dari masa lalu, macam-macam, ada yang 10 tahun yang lalu ya, bahkan ada 12 tahun yang lalu, yang terakumulasi yang, yang besar-besar saja itu. Nah, itu Jiwasraya, Asabri, Garuda, Krakatau Steel, Antam, Waskita itu, saya jumlah, 105 triliun.

Ya, kita senang itu terungkap. Tapi, tentu terkait dengan, apa namanya, usulan PMN dari Kementerian BUMN tahun 2025 ini, sebesar 44,249 triliun yang akan dialokasikan ke 16 BUMN, kami prinsipnya menyetujui, Pak. Tapi, tentu dengan catatan ya, yang sebetulnya catatan itu semua sudah menjadi kesimpulan rapat ketika kami rapat-rapat dengan BUMN itu, bahwa PMN ini nanti harus dikelola secara amanat, secara profesional, dan tidak ada lagi kasus-kasus *mark up*, kasus *moral hazard fraud* ya, terjadi terkait dengan pengelolaan PMN ini.

Oleh karena itu, kami menyetujui dan dengan harapan Kementerian BUMN harus melakukan fungsi pengawasan secara ketat terhadap PMN yang nantinya juga semoga disetujui oleh Kementerian Keuangan.

Itu, Pimpinan. Terima kasih.

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

**KETUA RAPAT (M. SARMUJI, S.E., M.Si./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):**

Terima kasih, Pak Amin, mewakili Fraksi PKS.

**Pak Menteri,**



Dari sembilan fraksi tadi, hampir semuanya menerima secara penuh, kecuali beberapa catatan ada yang tidak diterima secara penuh, tapi yang jelas sembilan fraksi itu memberikan apresiasi pada Pak Menteri. Menjelang penyusunan kabinet, apresiasi begini agak berarti, Pak Menteri.

Baik, saya bacakan kesimpulan rapat kita kali ini, karena semua fraksi sudah memberikan pandangannya. Tolong ditayangkan.

Oh, sebentar, layarnya masih kepanasan. Layar *aja* kepayahan, Pak Menteri, ini, apalagi teman-teman Anggota ini.

**MENTERI BUMN RI (Dr. H. ERICK THOHIR, B.A., M.B.A):**

Pimpinan.

**KETUA RAPAT (M. SARMUJI, S.E., M.Si./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):**

Siap.

**MENTERI BUMN RI (Dr. H. ERICK THOHIR, B.A., M.B.A):**

Untuk seluruh poinnya, saya rasa tidak ada masalah. Kami izin waktu, mengecek mengenai angka-angkanya saja, di poin.

**KETUA RAPAT (M. SARMUJI, S.E., M.Si./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):**

Oh iya, silakan.

**MENTERI BUMN RI (Dr. H. ERICK THOHIR, B.A., M.B.A):**

Di poin, nah itu *udah*. Saya rasa poin nomor 1, 3, 4 tidak ada masalah, tinggal kasih waktu kami mengecek yang poin nomor dua, mengenai total PMN-nya.

Sebentar.

**KETUA RAPAT (M. SARMUJI, S.E., M.Si./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):**

Silakan, silakan. Iya, angkanya perlu dicek.

**MENTERI BUMN RI (Dr. H. ERICK THOHIR, B.A., M.B.A):**

Yang a sampai g, saya rasa angkanya sesuai.

**KETUA RAPAT (M. SARMUJI, S.E., M.Si./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):**



Silakan saja, Pak Menteri.

**MENTERI BUMN RI (Dr. H. ERICK THOHIR, B.A., M.B.A):**

Sudah, *oke*.

**KETUA RAPAT (M. SARMUJI, S.E., M.Si./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):**

*Oke ya?*

**MENTERI BUMN RI (Dr. H. ERICK THOHIR, B.A., M.B.A):**

*Clear.*

**KETUA RAPAT (M. SARMUJI, S.E., M.Si./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):**

Baik, saya bacakan draf kesimpulan Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI dengan Menteri BUMN.

Pertama, Komisi VI DPR RI telah menerima penjelasan atas usulan Penyertaan Modal Negara (PMN) Tahun Anggaran 2025 dan *monitoring* atas Penyertaan Modal Negara Tahun Anggaran 2020 hingga 2024.

Setuju ya?

**(RAPAT: SETUJU)**

Dua, Komisi VI DPR RI menerima penjelasan dan menyetujui usulan Penyertaan Modal Negara (PMN) Tahun Anggaran 2025 dari Kementerian BUMN dengan perincian sebagai berikut:

- a. PT Utama Karya sebesar Rp13.868.000.000.000,00 (*Tiga belas triliun delapan ratus enam puluh delapan miliar rupiah*) dalam rangka melanjutkan pembangunan JT, JTTS Fase 2 dan 3.

Oke, ya?

**(RAPAT: SETUJU)**

- b. PT Asabri sebesar Rp3.610.000.000.000,00 (*Tiga triliun enam ratus sepuluh miliar rupiah*) dalam rangka perbaikan permodalan.

**(RAPAT: SETUJU)**





- c. PT Perusahaan Listrik Negara sebesar Rp3.000.000.000.000,00 (*Tiga triliun rupiah*) dalam rangka program listrik desa.

Setuju?

**(RAPAT: SETUJU)**

- d. PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia sebesar Rp3.000.000.000.000,00 (*Tiga triliun rupiah*) untuk penguatan permodalan dalam rangka penjaminan KUR dan mendorong untuk melakukan penyesuaian kecukupan IJP KUR.

Setuju?

**(RAPAT: SETUJU)**

- e. PT Pelayaran Nasional Indonesia sebesar Rp2.500.000.000,00 (*Dua triliun lima ratus miliar rupiah*) dalam rangka pengadaan kapal baru.

**(RAPAT:SETUJU)**

- f. PT Biofarma sebesar Rp2.212.000.000.000,00 (*Dua triliun dua ratus dua belas miliar rupiah*) dalam rangka fasilitas *capital expenditure* baru.

Oke?

**(RAPAT: SETUJU)**

- g. PT Adi Karya sebesar Rp2.096.000.000.000,00 (*Dua triliun sembilan puluh enam miliar rupiah*) dalam rangka pembangunan tol *Jogja-Bawen* dan *Solo-Jogja*.

Setuju ya?

**(RAPAT: SETUJU)**

- h. PT Wijaya Karya, Tbk sebesar Rp2.000.000.000,00 (*Dua triliun rupiah*) dalam rangka perbaikan struktur permodalan.

Setuju ya?

**(RAPAT: SETUJU)**

- i. PT LEN Industri sebesar Rp2.000.000.000,00 (*Dua triliun rupiah*) dalam rangka penyehatan keuangan.



Oke ya?

**(RAPAT: SETUJU)**

- j. PT Danareksa sebesar Rp2.000.000.000,00 (*Dua triliun rupiah*) dalam rangka pengembangan usaha, dengan *minderheit nota* dari PDI Perjuangan, PDI Perjuangan menolak PMN untuk PT Danareksa.

Enggak apa-apa di sini. Oke.

**(RAPAT: SETUJU)**

- k. Masuk, *minderheit nota* masuk.
- k. PT Kereta Api Indonesia sebesar Rp1.800.000.000,00 (*Satu triliun delapan ratus miliar rupiah*) dalam rangka pengadaan *trainset* baru penugasan pemerintah.

Setuju ya?

**(RAPAT: SETUJU)**

- l. PT Rajawali Nusantara Indonesia sebesar Rp1.624.000.000.000,00 (*Satu triliun enam ratus dua puluh empat miliar rupiah*) dalam rangka modal kerja program CPP.

Oke ya? Setuju ya?

**(RAPAT: SETUJU)**

- m. PT Pembangunan Perumahan, Tbk sebesar Rp1.563.000.000.000,00 (*Satu triliun lima ratus enam puluh tiga miliar rupiah*) dalam rangka penyelesaian *proyek Jogja-Bawen dan Kawasan Industri Terpadu Subang*.

Setuju ya?

**(RAPAT: SETUJU)**

Ini sebenarnya agak berbau ini, Pak Menteri, kaleng Konghuan isi rengginang. Judulnya PT Pembangunan Perumahan, tetapi proyek-nya, proyek tol, tidak membangun rumah.

- n. Perum, Perum Damri sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (*Satu triliun rupiah*) dalam rangka penyediaan bus listrik, dengan catatan PDI Perjuangan hanya menyetujui Rp500 miliar dalam rangka penyediaan bus di jalur perintis ya?



**F-PDIP (Dr. Ir. HARRIS TURINO, S.H., M.Si., M.M.):**

Itu kalau 1 triliun bukan cuma bus listrik, tetapi bus diesel untuk perintis dan bus listrik, kalau 1 triliun. Itu, catatannya salah.

**KETUA RAPAT (M. SARMUJI, S.E., M.Si./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):**

Oh, iya, iya. Iya, iya. Enggak, enggak, enggak, n kurang itu. N-nya itu dalam rangka penyediaan bus listrik dan bus diesel, ya. Tolong diperbaiki ya?

Dengan catatan PDI Perjuangan menyetujui Rp500 miliar untuk bus diesel di jalur perintis.

- o. Perum Perumnas sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (*Satu triliun rupiah*) dalam rangka restrukturisasi dan penyelesaian persediaan dengan catatan PDI Perjuangan menolak alokasi PMN ini.
- p. PT Industri Kereta Api sebesar Rp976.000.000.000,00 (*Sembilan ratus tujuh puluh enam miliar rupiah*) dalam rangka pembuatan kereta KRL.

Ini pembelian ini ya? kereta api kan pembelian ini?

**WAKIL KETUA (MOHAMAD HEKAL, M.B.A./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):**

Pembuatan.

**KETUA RAPAT (M. SARMUJI, S.E., M.Si./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):**

Pembuatan? Oh, ini Inka ini, oh *sorry*, ini Inka ,bukan PT KAI. Ya, Banyuwangi dan Madiun.

**(RAPAT: SETUJU)**

Tiga.

Ada klarifikasi?

**WAMEN BUMN RI (KARTIKA WIRJOATMODJO, S.E., M.B.A.):**

Yang poin i, tadi *penyehatan keuangan* diganti *modernisasi peralatan*.

LEN, Pak. LEN.

**KETUA RAPAT (M. SARMUJI, S.E., M.Si./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):**



LEN.

**WAMEN BUMN RI (KARTIKA WIRJOATMODJO, S.E., M.B.A.):**

Point i, tadi, Pak. Bukan penyehatan keuangan, poin i.

**KETUA RAPAT (M. SARMUJI, S.E., M.Si./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):**

I, i, i.

**WAMEN BUMN RI (KARTIKA WIRJOATMODJO, S.E., M.B.A.):**

Tadi kelewatan, Pak.

**KETUA RAPAT (M. SARMUJI, S.E., M.Si./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):**

LEN, bukan penyehatan keuangan?

**WAMEN BUMN RI (KARTIKA WIRJOATMODJO, S.E., M.B.A.):**

*Modernisasi peralatan.*

**KETUA RAPAT (M. SARMUJI, S.E., M.Si./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):**

Modernisasi.

**WAMEN BUMN RI (KARTIKA WIRJOATMODJO, S.E., M.B.A.):**

*Peralatan produksi.*

**MENTERI BUMN RI (Dr. H. ERICK THOHIR, B.A., M.B.A.):**

*Modernisasi dan peningkatan kapasitas produksi, maaf.*

**KETUA RAPAT (M. SARMUJI, S.E., M.Si./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):**

Iya, oke. Kita revisi.

**MENTERI BUMN RI (Dr. H. ERICK THOHIR, B.A., M.B.A.):**

*Modernisasi dan peningkatan kapasitas produksi.*

**KETUA RAPAT (M. SARMUJI, S.E., M.Si./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):**



Kita revisi.

Baik, nomor tiga.

Diperbaiki, diperbaiki. Coba diperiksa lagi, ada yang salah lagi enggak? Cukup.

Poin ketiga, Komisi VI DPR RI meminta Menteri BUMN untuk memberi perhatian terhadap masukan dan catatan yang diberikan tiap poksi Komisi VI DPR RI terkait usulan Penyertaan Modal Negara (PMN) Tahun 2025.

Oke ya?

**(RAPAT: SETUJU)**

Empat, Komisi VI DPR RI akan memonitor dan meminta Menteri BUMN untuk memastikan agar PMN dipergunakan secara produktif, efektif dan efisien bagi peningkatan kinerja korporasi BUMN sesuai prinsip-prinsip *good corporate governance*.

**(RAPAT: SETUJU)**

Sudah, sudah langsung di, tadi.

*Minderheit* notanya PDI sudah masuk di poin yang tadi saya sebutkan. Cukup, Pak?

**F-PDIP (Dr. Ir. HARRIS TURINO, S.H., M.Si., M.M.):**

Izin, Pimpinan.

Kami dari Fraksi PDI Perjuangan meminta agar pendapat fraksi kami dicantumkan sebagai catatan di kesimpulan tersebut.

*Makasih.*

**KETUA RAPAT (M. SARMUJI, S.E., M.Si./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):**

Oke, baik.

Poin satu lagi, catatan masing-masing fraksi menjadi bagian tak terpisahkan dari pengambilan keputusan ini.

Begitu, Pak Haris? Kira-kira? Iya.

Baik,



**Bapak-Bapak,  
Ibu-Ibu yang saya hormati,  
Menteri BUMN, beserta seluruh jajaran yang kami hormati,**

Dengan dibacakannya kesimpulan tadi, selesai sudah rapat kerja kita.

**WAKIL KETUA (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):**

Pak Sarmuji, sedikit, Pak Sarmuji.

**KETUA RAPAT (M. SARMUJI, S.E., M.Si./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):**

Silakan.

**WAKIL KETUA (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):**

Hanya aspirasi saja, dari hasil kunjungan kerja Komisi VI ke *Jogja*, masih ada utang kami dengan koperasi, ya, nasabah korban gempa, yang waktu itu disepakati dalam kunjungan kerja Komisi VI, yang tidak lebih dari 2 miliar 200, untuk kita selesaikan menggunakan dana CSR.

Itu *aja*, Pak. Nanti saya selesaikan sama staf khusus, Pak Aria Sinulingga.

**KETUA RAPAT (M. SARMUJI, S.E., M.Si./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):**

Baik, silakan, Pak Bimo.

Baik. Pak Menteri, rapat kerja kita sudah selesai. Kalau ada *closing statement*, kami persilakan.

Sebaiknya ada, Pak Menteri.

**MENTERI BUMN RI (Dr. H. ERICK THOHIR, B.A., M.B.A):**

Terima kasih.

**Pimpinan, dan  
Anggota Komisi VI yang hadir hari ini,**

Tentu dari persetujuan yang diberikan kepada PMN adalah hal yang positif buat kami, dengan nilai 44,279, walaupun ada catatan tadi. Dan ini berarti merupakan usulan yang bisa langsung didorong di Rapat Pimpinan DPR tentunya, sehingga kami dengan putusan hari ini, kita coba juga mulai mensosialisasi secara internal dan menghitung kembali mana-mana yang memang sebagai catatan untuk bisa dimaksimal di kemudian hari, *gitu*.



Yang kedua, kembali bila berkenan, Pimpinan, tentu kami tidak malu untuk kembali mengulang-ulang dan ini juga memang inisiasi dari, tentu Komisi VI yang saya hormati, mengenai RUU BUMN, saya rasa ini menjadi hal yang bisa menyelesaikan beberapa poin, catatan yang sudah disampaikan sebelumnya, mengenai apakah penugasan, apakah tentu bagaimana ketika program kementerian lain juga harus menjadi bagian daripada operasional usaha.

Bahkan kemarin, pada rapat kami dengan BPK pun, BPK memberikan catatan bahwa penting sekali *transparasi* daripada beberapa program kementerian yang memang diberikan kepada kami, terutama untuk pengalihan aset-aset yang di mana selesai dari hasil audit BPK, kadang-kadang aset yang diberikan itu justru yang di kemudian hari harus menjadi catatan di BPK sendiri, itu.

Saya tidak bisa jelaskan, cuma nanti mungkin catatan dari BPK bisa dibaca di kemudian hari, karena ini yang kita harus pastikan, memang hal-hal ini bisa menjadi perbaikan di kemudian hari. Itu yang saya mungkin bisa sampaikan.

Terima kasih, Pimpinan.

**KETUA RAPAT (M. SARMUJI, S.E., M.Si./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):**

Terima kasih, Pak Menteri.

Dengan *closing statement* Pak Menteri, berakhir sudah rapat kerja kita kali ini. Dengan mengucapkan *Alhamdulillahirabbil alamin*, rapat kerja ini ditutup.

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

**(RAPAT DITUTUP PUKUL 21.36 WIB)**

a.n. KETUA RAPAT  
SEKRETARIS RAPAT,

TTD.

**DEWI RESMINI, S.E., M.Si.**  
NIP. 197104071992032001

